

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN
2011 TENTANG PAJAK DAERAH DI KECAMATAN
BUNGURAN BARAT SEDANAU
KABUPATEN NATUNA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



UIN SUSKA RIAU

AHMAD NADHORI
10827003245

**PROGRAM S1
JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2015**



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. BOX 1004
Telp. 0761-561645 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id Email : rector@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH DI KECAMATAN BUNGURAN
BARAT SEDANAU KABUPATEN NATUNA" yang ditulis oleh :

Nama : AHMAD NADHORI
NIM : 10827003245
Jurusan : Ilmu Hukum (Hukum Tata Negara)

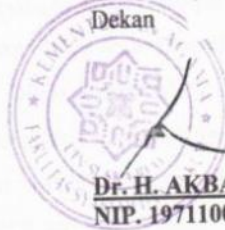
Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Sarjana Program S1 pada Fakultas Syari'ah
dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 23 Juni 2015
Bertepatan : 06 Ramadhan 1436 H

Sehingga dapat diterima dan disahkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH).

Pekanbaru, Juli 2015

Dekan



Dr. H. AKBARIZAN, M.Ag., M.Pd.
NIP. 19711001 199503 1002

PANITIA UJIAN SARJANA

KETUA

Dr. Zulkifli, M.Ag.
NIP. 19741006200501 1005

SEKRETARIS

H. Ismardi Rias, MA
NIP. 19711001 199503 1002

PENGUJI I

FIRDAUS, SH, MH
NIP. 19661002 199403 1 002

PENGUJI II

Lysa Angravni, SH, MH
NIP. 197901312006042003

ABSTRAK

Penerapan Pajak Air Tanah merupakan hal yang cukup sulit untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat yang menggunakan air tanah sebagai usaha, karena setiap penggunaan air tanah sebagai usaha merupakan hal yang masih memerlukan sosialisasi yang intensif bagi masyarakat agar mengerti dan memahami akan arti penting pajak tersebut untuk pembangunan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak air tanah di Kabupaten Natuna, apa hambatan dalam pemungutan pajak air tanah di Kabupaten Natuna, dan bagaimanakah penyelesaian terhadap pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 di Kabupaten Natuna.

Dilihat dari jenisnya penelitian ini adalah penelitian Hukum Sosiologis tentang Pemberlakuan Hukum yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah khususnya pajak air tanah di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, artinya menjelaskan dan menggambarkan secara rinci tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011, kendala dalam pemungutan pajak, serta penyelesaian pelanggaran dalam pembayaran pajak yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna.

Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2011 dilakukan dengan cara melakukan pemungutan pajak terhadap pengambilan atau pemanfaatan air tanah untuk usaha, seperti tempat cucian mobil/motor, restoran/rumah makan dan sebagainya, dilakukan melalui Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), sebesar 20% (dua puluh) persen dari nilai perolehan air tanah berdasarkan pertimbangan terhadap faktor yang berhubungan dengan pengaruh pemanfaatan air tanah tersebut, sesuai Pasal 42 dan 43 Perda Nomor 1 Tahun 2011. Apabila wajib pajak terlambat melakukan pembayaran maka dikenai denda sebesar 2% (dua) persen setiap bulan keterlambatan.

Hambatan dalam pemungutan pajak air tanah antara lain adalah, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, kurang transparannya wajib pajak, kurangnya sosialisasi dari instansi terkait sehingga wajib pajak kurang mengetahui, bahwa ia harus melakukan pembayaran terhadap pajak air tanah yang mereka gunakan. Kemudian membayar yang tidak sesuai dengan tagihan, terlambat membayar pajak, serta tidak membayar pajak sama sekali.

Penyelesaian terhadap pelanggaran pembayaran pajak air tanah yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna dengan cara memberikan surat teguran kepada wajib pajak, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari wajib pajak harus segera melunasi pajak yang terhutang. Penyelesaian terhadap pembayaran pajak air tanah ini lebih kepada memberikan kesempatan dengan memberikan tenggang waktu, sebagaimana yang dijelaskan dalam Perda.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada Penulis. Akhirnya penulis berhasil menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara Moril maupun Materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta, orang tua dan adik, yang telah memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih untuk semuanya.
2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. DR. H. Munzir Hitami, MA beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak DR. H. Akbarizan, MA. M.Pd, Dekan fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses Penyelesaian Skripsi ini.

4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Ibu Hj. Nur'aini Sahu, SH.MH, dan sekretaris jurusan Bapak Asril, SH.MH, serta staf Jurusan Ilmu Hukum, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak DR. Hajar M, MH yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu para Staf pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna, yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam mendapatkan data dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak /Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Sehingga penulis bisa seperti ini mengerti apa yang belum penulis mengerti. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.
8. Kepada semua sahabat-sahabatku, yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Juli 2015

AHMAD NADHORI
NIM. 10827003245

DAFTAR ISI

PENGESAHAN

ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masaalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	10

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kabupaten Natuna.....	12
B. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna....	14
C. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.....	24
D. Kecamatan Bunguran Barat Sedanau Kabupaten Natuna.....	25

BAB III : TINJAUAN TEORITIS TENTANG PAJAK

A. Pengertian dan Objek Pajak.....	27
B. Fungsi Pajak, Macam, dan Metode Pemungutan Pajak.....	31
C. Peraturan Perundang-undangan Tentang Pajak.....	37

**BAB IV : PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN
2011 TENTANG PAJAK DAERAH DI KECAMATAN
BUNGURAN BARAT SEDANAU KABUPATEN NATUNA**

- A. Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah.....41
- B. Hambatan dalam Pemungutan Pajak Air Tanah.....53
- C. Penyelesaian Pelanggaran dalam Pembayaran Pajak Air Tanah..51

BAB V: PENUTUP

- A. Kesimpulan.....66
- B. Saran.....67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN